Volume 9 Issue 3 (2025) Pages 779-788
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
ISSN: 2549-8959 (Online) 2356-1327 (Print)

Pemerataan Akses Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini di Indonesia: *A Scoping Review*

Haztika Jihadania Asdhar[1]✉, Nono Hery Yoenanto[2]
Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Indonesia[(1,2)]
DOI: 10.31004/obsesi.v9i3.6450

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperluas akses pendidikan inklusi bagi anak usia dini di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *scoping review* dengan seleksi artikel berbasis metode PRISMA. Terdapat 7 artikel yang dibahas pada penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan utama berupa kurangnya pelatihan guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Selain itu, kurikulum yang tidak fleksibel dan dukungan transportasi yang minim. Namun, peluang signifikan ditemukan melalui kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas guru, dukungan dari komunitas lokal serta organisasi internasional. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pihak terkait untuk menciptakan sistem pendidikan inklusi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *anak usia dini; peluang; pendidikan inklusi; tantangan.*

Abstract
This study aims to identify the challenges and opportunities in expanding access to inclusive education for early childhood in Indonesia. The method utilized is a scoping review, with article selection based on the PRISMA method. Seven articles are discussed in this study. The results indicate several primary challenges, including a lack of teacher training, limited facilities and infrastructure, and societal stigma towards children with special needs (CWSN). Furthermore, an inflexible curriculum and minimal transportation support present additional barriers. Nevertheless, significant opportunities are identified through government policies, improvements in teacher quality, support from local communities, and international organizations. This study recommends collaboration among stakeholders to develop a sustainable and inclusive education system.

Keywords: *challenges; early childhood; inclusive education; opportunity.*

✉ Corresponding author :
Email Address : haztika.jihadania.asdhar-2023@psikologi.unair.ac.id (Surabaya, Indonesia)
Received 13 December 2024, Accepted 14 January 2025, Published 1 April 2025

Pendahuluan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.70 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 menjadi landasan penting mengenai pemenuhan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Peraturan ini tidak hanya mencakup jenjang sekolah dasar melainkan juga jenjang pendidikan anak usia dini (Khoeriah, 2017 dalam Yunitasari et al., 2022). Data yang didapatkan dari Dapodik per November 2024

DOI: 10.31004/obsesi.v9i3.6450

menunjukkan terdapat 341.414 peserta didik berkebutuhan khusus dan 162.038 diantaranya telah menempuh pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) dan sisanya berada pada sekolah regular. Meskipun begitu, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen menjelaskan bahwa unit layanan disabilitas masih kurang dan belum merata (Yulianti, 2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 menjelaskan anak berkebutuhan khusus ke dalam 3 kaegori. Pertama, anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social. Kedua, Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ketiga, anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus (Kemendikbudristek, 2022). Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus bukan hanya penyandang disabilitas, namun juga anak-anak cerdas istimewa dan anak-anak di daerah 3T (Terpencil, Terluar, Tertinggal). Kelompok-kelompok anak tersebut berhak mendapatkan pemenuhan pendidikan sebagaimana anak-anak regular pada umumnya. Salah satu upaya untuk memberikan pendidikan yang setara bagi semu anak ialah melalui pendidikan inklusi (Sulistyadi, 2014).

Di Indonesia, pendidikan inklusi telah menjadi bagian dari kebijakan nasional. Terutama dengan adanya komitmen terhadap "Pendidikan untuk Semua" (*Education for All*), yang telah diakui secara global. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di Indonesia, di mana jumlah anak berkebutuhan khusus terus meningkat. WHO menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat 3000 sampai 5000 anak yang lahir dalam kondisi *down syndrome* (Alim, 2023). Oleh karena itu, keterlibatan semua elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusi, khususnya di jenjang pendidikan anak usia dini, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

Pendidikan anak usia dini adalah periode kritis dalam perkembangan anak, di mana mereka mulai membangun fondasi untuk keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang akan berpengaruh sepanjang hidup mereka (Rahmi & Wijayanti, 2024). Dalam konteks ini, anak-anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian dan dukungan yang sesuai agar dapat berinteraksi dengan teman sebaya, belajar dalam lingkungan yang positif, dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Namun, meskipun pendidikan inklusi sudah menjadi perhatian, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan di lapangan (Rahmi & Wijayanti, 2024).

Berbagai tantangan dalam memperluas akses pendidikan inklusi bagi anak usia dini datang dari berbagai aspek baik dari siswa, guru, orang tua, sekolah, bahkan pemerintah. Tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusi pada anak usia dini meliputi keterbatasan pelatihan guru, minimnya dukungan infrastruktur, dan stigma sosial dari masyarakat (Sari & Hendriani, 2021, dalamMuttaqien, 2023). Banyak guru di lembaga PAUD belum menerima pelatihan yang cukup mengenai penanganan anak dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka tidak siap untuk menerapkan metode pembelajaran yang inklusif. Selain itu, fasilitas yang mendukung pembelajaran inklusif, seperti ruang kelas yang ramah disabilitas, juga masih terbatas di berbagai daerah (Paramansyah et al., 2024).

Di sisi lain, terdapat peluang besar bagi pendidikan inklusi anak usia dini di Indonesia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan inklusi semakin meningkat, dan pemerintah serta berbagai organisasi internasional, seperti UNICEF, terus mendorong kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas (Tarlam et al., 2023). Program-program yang melibatkan komunitas, dukungan kebijakan dari pemerintah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan guru diharapkan dapat membantu mempercepat pemerataan pendidikan inklusi di Indonesia (Nilamsari, 2018). Disamping itu, meskipun berbagai peluang muncul baik dari pemerintah, organisasi internasional dan komunitas sosial, nyatanya masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan belajar. Hal ini ditunjukkan dari ketersediaan pendidikan inklusi yang mayoritas berada di kota-kota besar (Jauhari, 2017). Selain itu, sekolah-sekolah

DOI: 10.31004/obsesi.v9i3.6450

yang telah menerapkan pendidikan inklusi masih belum siap menjalankan program tersebut (Maghfiroh, Andika, Pratiwi, Marcela, & Afifah, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih detail mengenai berbagai tantangan dan peluang yang ada dalam pemerataan pendidikan inklusi bagi pendidikan anak usia dini di Indonesia melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, selain itu dapat pula menjadi rujukan bagi pemerintah, guru, orang tua dan komunitas yang bergerak pada bidang pendidikan untuk memahami tantangan dan peluang dalam upaya pemerataan pendidikan pendidikan inklusi bagi anak usia dini.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *scoping review* untuk memetakan tantangan dan peluang dalam pemerataan pendidikan inklusi di Indonesia. Analisis scoping review pada penelitian ini menggunakan aturan dari PRISMA (Tricco et al., 2018)untuk menjamin kualitas penuelitian. Arksey & O'Malley (2005) menjelaskan beberapa tahapan pada metode ini yakni mengidentifikasi pertanyaan penelitian, mengidentifikasi artikel yang relevan, menyeleksi artikel, melakukan ekstraksi dan *charting* data, menganalisis, meringkas dan melaporkan hasil.
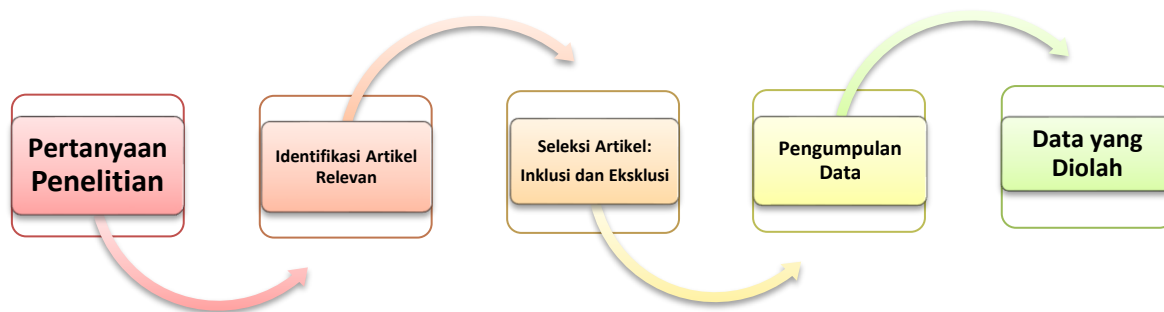
Gambar 1. Tahapan dalam metode PRISMA

Pada tahap pertama dilakukan identifikasi pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, terdapat dua pertanyaan penelitian yakni (1) Apa saja peluang dalam pemerataan pendidikan inklusi anak usia dini di Indonesia? (2) Apa saja peluang dalam pemerataan pendidikan inklusi anak usia dini di Indonesia?

Pada tahap kedua, Peneliti melakukan identifikasi penelitian yang relevan melalui pencarian artikel di berbagai *research database* seperti SINTA, *Google Scholar, Web of Science* dan Beberapa kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel adalah pendidikan inklusi, anak usia dini, peluang dan tantangan.

Pada tahap ketiga, dilakukan seleksi artikel dengan melihat kriteria inklusi dan eksklusinya. Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup faktor peluang dan tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan inklusi anak usia dini di Indonesia. Oleh karena itu, populasi, konteks dan konsep penelitian yang diseleksi harus mencakup beberapa kriteria inklusi berikut ini, yakni (1) peluang dan tantangan pemerataan pendidikan inklusi bagi segi praktik pendidikan, budaya dan kebijakan (2) konteks berada pada ruang lingkup pendidikan anak usia dini (3) artikel terindeks SINTA (4) artikel terbit dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan kriteria eksklusi pada penelitian ini mencakup hal-hal di luar kriteria inklusi

Pada tahap keempat, peneliti melakukan seleksi artikel dengan menggunakan bantuan aplikasi Rayyan.ai. Langkah-langkah dalam penggunaan Rayyan.ai diantaranya yakni pertama, artikel-artikel yang sesuai kata kunci diunggah pada *Rayyan.ai*. Kedua, peneliti membaca abstrak dari setiap artikel. Ketiga, peneliti mengkategorikan artikel-artikel yang masuk dalam kriteria inklusi dan eksklusi. Keempat, peneliti membaca kembali lebih detail artikel-artikel yang masuk dalam kategori inklusi untuk memastikan bahwa artikel

DOI: 10.31004/obsesi.v9i3.6450

tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria inklusi dan apabila masih terdapat artikel yang tidak sesuai, maka artikel tersebut dimasukkan dalam kategori eksklusi. Terakhir, artikel-artikel yang terpilih akan dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, maka dari 64 artikel yang sesuai kata kunci, terpilihlah 7 artikel yang paling sesuai dengan kriteria inklusi yang selanjutnya akan di-*review* pada penelitian ini.

Pada tahap terakhir dari alur PRISMA, seluruh artikel yang terpilih selanjutnya akan dipaparkan dalam tabel untuk memudahkan proses analisis dan identifikasi. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut akan dideskripsikan dan dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Identifikasi Tantangan dan Peluang pada Artikel yang Terpilih

Judul Artikel	Tantangan/Peluang
Challenges In Implementing Inclusive Education In An Indonesian Kindergarten; A Case Study (Pasiningsih, 2024b)	Tantangan: latar belakang guru yang tidak sesuai,Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru terkait pendidikan inklusif karena sebagian besar guru tidak berasal dari latar belakang pendidikan anak usia dini (PAUD). Minimnya pelatihan Pelatihan yang diberikan oleh sekolah sangat minim dan tidak cukup untuk mempersiapkan guru menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Kurangnya Dukungan Orang Tua, Dukungan dari orang tua sangat terbatas, khususnya orang tua dari siswa non-disabilitas yang khawatir bahwa siswa berkebutuhan khusus bisa mempengaruhi perilaku anak mereka. Peluang: - Dukungan dari UNESCO untuk penerapan pendidikan inklusi di seluruh dunia - SK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No 380/C.66/MN/2003 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 - Baik siswa maupun guru memiliki sikap positif terhadap pendidikan inklusif.
Tantangan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Indonesia (Nurhadipa et al., 2023)	Tantangan: Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Banyak sekolah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus, seperti aksesibilitas untuk kursi roda atau peralatan pembelajaran khusus. Kekurangan Sumber Daya Manusia: Guru yang terlatih untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus masih kurang. Banyak guru belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung siswa dengan disabilitas Pendanaan yang Tidak Cukup: Implementasi pendidikan inklusi membutuhkan sumber daya tambahan, seperti guru pendamping dan alat bantu khusus. Pendanaan yang tidak memadai menjadi salah satu hambatan utama. Stereotip dan Stigma: Persepsi negatif terhadap siswa dengan

DOI: 10.31004/obsesi.v9i3.6450

	disabilitas masih menjadi masalah di masyarakat. Hal ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan inklusi. Kebijakan yang Tidak Konsisten: Meskipun ada peraturan perundangan yang mendukung pendidikan inklusi, penerapannya tidak selalu konsisten di berbagai daerah. Infrastruktur dan dukungan di beberapa wilayah masih kurang. transportasi: Aksesibilitas transportasi menuju sekolah bagi siswa dengan disabilitas juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih. Kurangnya Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat: Rendahnya kesadaran dan dukungan dari orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusi menjadi hambatan dalam implementasinya
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo (Sulistyadi, 2014)	Tantangan: Kurangnya Sumber Daya Manusia: Masih kurangnya tenaga pendidik khusus (GPK) yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus. Mayoritas GPK adalah guru reguler yang dilatih, sehingga menghadapi kesulitan dalam menangani ABK. Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang tersedia masih terbatas, menyebabkan bantuan fasilitas tidak merata di semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Fasilitas Tidak Memadai: Beberapa sekolah belum memiliki fasilitas yang sesuai standar, seperti ruang sumber untuk pembelajaran ABK. Peluang: Komitmen Pemerintah: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk alokasi anggaran dan pemberian bantuan fasilitas
Model Layanan Pendidikan Inklusif Di Indonesia (Jannah et al., 2021)	Tantangan: Minimnya kesiapan sekolah untuk menjalankan pendidikan inklusif Keterbatasan sarana, prasarana, serta kualifikasi guru yang belum memadai. Kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat masih rendah. Kurikulum yang belum fleksibel dan tidak responsif terhadap kebutuhan ABK. Peluang: - Pemerintah telah menetapkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). - Kelas Reguler (Inklusif Penuh): Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) belajar bersama peserta didik reguler tanpa ada perbedaan perlakuan. - Model Cluster: PDBK dikelompokkan dalam satu kelas dengan peserta didik reguler dan didampingi guru pendamping.

DOI: 10.31004/obsesi.v9i3.6450

	- Model Pull Out: PDBK belajar di ruang khusus dengan bimbingan khusus untuk pelajaran tertentu. - Model Cluster dan Pull Out: Kombinasi model Cluster dan Pull Out. - Model Kelas Khusus: PDBK belajar di kelas khusus, tetapi berinteraksi dengan peserta didik reguler di luar kelas. - Model Khusus Penuh: PDBK belajar secara terpisah dari peserta didik reguler
Pandangan Guru dan Orang Tua tentang Pendidikan Inklusif di Taman Kanak-Kanak (Baroroh & Rukiyati, 2022)	Peluang: - Pandangan positif guru dan orang tua terhadap pendidikan inklusi Tantangan: - Guru hanya memiliki pemahaman dasar mengenai penidikan inklusif sehingga memiliki keterbatasan dalam penyusun program belajar yang fleksibel - Guru menghadapi kesulitan dalam memodifikasi kurikulum dan adaptasi metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan beragam kemampuan. - Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus khawatir jika anaknya tidak diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. - Beberapa orang tua khawatir anak mereka yang tanpa disabilitas meniru perilaku buruk yang mungkin dilakukan oleh anak penyandang disabilitas. - Stigma negatif terhadap anak-anak penyandang disabilitas dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaannya.
Persepsi Guru TK terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pontianak (Yuniarni et al., 2023)	Peluang: - persepsi para guru TK terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Pontianak tergolong baik dimana sebesar 73,3% guru TK menyatakan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusi yang baik untuk anak berkebutuhan khusus. - Persepsi guru-guru TK mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Pontianak tergolong baik, dimana sebesar 63,2% menyatakan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusi yang baik untuk ABK. Sebagian besar guru TK memahami diselenggarakannya pembelajaran dengan konsep inklusi bertujuan memfasilitasi ABK untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik sesuai dengan kondisinya masing-masing. - Persepsi para guru TK mengenai fasilitas pendidikan inklusif di Kota Pontianak tergolong baik yaitu sebanyak 74% guru TK menyatakan tentang fasilitas pembelajaran untuk ABK sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran pada pendidikan inklusif.

DOI: 10.31004/obsesi.v9i3.6450

Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan PAUD (Yunitasari, Farista, Palupi, Yusnita, & Rohmah, 2022)	Tantangan: - Manajemen pelaksanaan pendidikan inklusi yang belum optimal khususnya dalam merancang kegiatan serta anggaran belanja Peluang: - Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 - Kerjasama antara pelaksana pendidikan inklusif dengan tenaga ahli seperti tim pengajar, psikolog, fisioterapis, terapis wicara, guru lulusan PAUD - Tutor sebaya untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus - Menggunakan kurikulum dari kemendikbudristek dan *Individual Learning Program* - Menggunakan model penilaian dan pelaporan perkembagan anak yang disediakan pemerintah pada program PPI - Sosialisasi antara sekolah dengan masyarakat khususnya orang tua untuk memberi pemahaman terkait pendidikan inklusi - Kerjasama sengan Posyandu di sekitar lingkungan sekolah.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi pendidikan inklusi anak usia dini di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, namun juga membuka peluang signifikan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan inklusif. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kualitas pelatihan guru. Banyak tenaga pendidik di lembaga PAUD belum memiliki latar belakang pendidikan khusus yang relevan atau pelatihan yang memadai untuk menangani anak berkebutuhan khusus (ABK). (Pasiningsih, 2024) menjelaskan bahwa sebagian besar guru tidak berasal dari latar belakang pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pendidikan khusus, sehingga mereka sering kali kesulitan merancang kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan ABK. Hal ini diperburuk dengan minimnya pelatihan yang diberikan oleh lembaga pendidikan, yang sering kali tidak cukup mendalam untuk mempersiapkan guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran inklusif. Penjelasan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur Maghfiroh et al., 2022)bahwa masih banyak guru bukan lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang berperan sebagai guru pembimbing khusus, alhasil banyak guru yang tidak paham bagaimana menhadapi emosi dan perilaku siswa berkebutuhan khusus.

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur menjadi hambatan signifikan dalam memperluas akses pendidikan inklusi. Penelitian (Nurhadipa et al. (2023)menunjukkan bahwa banyak sekolah di Indonesia belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas ramah disabilitas, aksesibilitas kursi roda, dan alat bantu pembelajaran khusus. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan anggaran pendidikan, yang membuat fasilitas inklusif tidak tersebar merata di seluruh daerah, terutama di wilayah terpencil. Tantangan ini adalah salah satu hal yang paling krusial dan hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang terus berlanjut. Penelitian yang dilakukan Utami & Putra (2020) menjelaskan bahwa hingga saat ini Dinas Pendidikan masih belum mengeluarkan pedoman tentang standar fasilitas ruang untuk sekolah inklusi, namun hanya memiliki standar fasilitas untuk sekolah umum.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jannah et al., 2021)mengidentifikasi bahwa kurikulum yang kurang fleksibel dan tidak responsif terhadap kebutuhan ABK juga menjadi penghalang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Saat ini kurikulum yang diterapkan pada pendidikan inklusi jenjang PAUD/TK ialah kurikulum yang ditetapkan pemerintah, Namun dilakukan modifikasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan anak didik (Kurniawati et al.,

DOI: 10.31004/obsesi.v9i3.6450

2023) modifikasi yang dilakukan dapat berupa modifikasi waktu, materi, proses belajar mengajar, sarana prasarana, lingkungan belajar dan manajemen kelas. Kurikulum yang dimodifikasi ini, maka terbentuk program belajar yang dirancang berdasarkan kebutuhan khusus anak atau disebur dengan Program Pembelajaran Individual atau PPI (Sujiono, 2009, dalam Kurniawati et al., 2023). Sayangnya, terdapat hambatan dalam implementasi kurikulum PAUD inklusi seperti terbatasnya informasi tentang PAUD inklusi, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai (Wahyu & Indira, 2019)

Tantangan sosial juga menjadi faktor penting yang menghambat implementasi pendidikan inklusi. Stigma dan stereotip negatif terhadap ABK masih kuat di masyarakat. (Baroroh & Rukiyati, 2022)menemukan bahwa sebagian orang tua siswa non-disabilitas khawatir bahwa anak mereka akan meniru perilaku negatif dari ABK. Ketidakpahaman masyarakat tentang konsep pendidikan inklusi ini sering kali memunculkan hambatan sosial yang signifikan, seperti kurangnya dukungan dari komunitas lokal. Lebih jauh, kebijakan pendidikan yang tidak konsisten di berbagai daerah juga menjadi tantangan utama. (Sulistyadi, 2014)mencatat bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi pendukung, penerapan kebijakan ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh, akses transportasi yang minim sering kali menghalangi ABK untuk mencapai lembaga pendidikan inklusif, terutama di daerah terpencil.

Meskipun tantangan tersebut besar, peluang yang ada memberikan harapan bagi masa depan pendidikan inklusi di Indonesia. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui kebijakan-kebijakan pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya akses pendidikan tanpa diskriminasi. Jannah et al. (2021)mencatat bahwa kebijakan ini menjadi landasan kuat bagi implementasi pendidikan inklusi di semua jenjang pendidikan, termasuk PAUD. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi juga semakin meningkat, didukung oleh inisiatif berbagai organisasi internasional, seperti UNICEF, yang secara aktif mempromosikan pendidikan inklusif di Indonesia (Tarlam et al., 2023)

Dukungan dari pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam memanfaatkan peluang ini. Penelitian Sulistyadi (2014) menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo, misalnya, telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan inklusi melalui alokasi anggaran yang lebih baik, pelatihan berkelanjutan bagi guru, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Selain itu, pelatihan berbasis komunitas dan program intervensi telah terbukti mampu meningkatkan kesiapan guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi (Tarlam et al., 2023). Dukungan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas dapat menjadi kunci sukses dalam mempercepat pemerataan pendidikan inklusi.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Upaya ini meliputi peningkatan pelatihan berkelanjutan bagi guru, pengembangan fasilitas pendidikan yang inklusif, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan, sehingga setiap anak, termasuk ABK, dapat mendapatkan hak mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal.

Simpulan

Dari berbagai temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi anak usia dini di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang mencakup aspek teknis, sosial, dan kebijakan. Keterbatasan pelatihan guru, fasilitas yang tidak memadai, stigma sosial, serta inkonsistensi kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat pemerataan pendidikan inklusi. Namun, peluang yang ada memberikan optimisme untuk memperbaiki kondisi ini. Kebijakan pemerintah yang kuat, dukungan masyarakat dan organisasi internasional, serta

DOI: 10.31004/obsesi.v9i3.6450

inisiatif lokal memberikan dasar yang kokoh untuk memperluas akses pendidikan inklusi. Langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi peningkatan pelatihan berkelanjutan bagi guru, pengembangan fasilitas pendidikan yang inklusif, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan setiap anak, termasuk ABK, dapat menikmati hak mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal di lingkungan pendidikan yang inklusif dan setara.

Penelitian ini memberikan pemetaan komprehensif mengenai tantangan dan peluang pendidikan inklusi, yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang berkaitan dalam pendidikan inklusi. Selain itu peneliti juga merekomendasikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk dapat mengeksplorasi implementasi model pelatihan berbasis teknologi untuk guru di daerah terpencil dalam upaya pemerataan pendidikan inklusi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Alim, M. *Kemdikbudristek Dorong Pertumbuhan Jumlah Sekolah Inklusi*. From JURNAS.com: https://www.jurnas.com/artikel/133548/Kemdikbudristek-Dorong-Pertumbuhan-Jumlah-Sekolah-Inklusi/

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice*, *8*(1), 19–32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Baroroh, E., & Rukiyati, R. (2022). Pandangan Guru dan Orang Tua tentang Pendidikan Inklusif di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *6*(5), 3944–3952. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2510

Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi sebagai Alternatif Solusi mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *Journal Ijtimaiya, 1*(1), 23-38. Retrieved from https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/viewFile/3099/2308

Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., Devi, N. D., & Akhmad, F. (2021). MODEL LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. In *ANWARUL : Jurnal Pendidikan dan Dakwah* (Vol. 1). https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/anwarul

Kurniawati, R., Setyorini, W., Ahdaniyah, D. M., Buton, M., & Yunitasari, S. E. (2023). Kurikulum dan Pembelajaran Program Pendidikan Inklusi PAUD. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, *9*(2), 1307–1312. https://doi.org/10.37905/aksara.9.2.1307-1312.2023

Mustika Dewi Muttaqien. (2023). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal Of Disability Studies And Research*, *2023*(2), 12–23.

Nilamsari, N. (2018). Komunikasi Antarpribadi Orangtua Dan Guru Dalam Memahami Pendidikan Inklusi Di Tk Jasmien Jakarta Utara. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, *1*(1), 71–82.

Nurhadipa, S., Ratna, P. L., Ulhasanah, N., & Andriani, O. (2023). Tantangan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, *4*(1), 148–154. https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i1.2353

Nur Maghfiroh, M., Septa Andika, D., Tyas Pratiwi, L., Nur Marcela, I., & Faza Afifah, A. (2022). Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, *3*(2), 314–318. https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jpdf

Paramansyah, H. A., Muhammad, M. M., & Parojai, R. (2024). *Pendidikan Inklusif Dalam Era Digital*. www.freepik.com

Pasiningsih. (2024). Challenges In Implementing Inclusive Education In An Indonesian Kindergarten; A Case Study. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* , *12*(1), 67–80. https://doi.org/10.21043/thufula.v11i2.25699

Rahmi, F. N., & Wijayanti, S. (2024). *Upaya Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*

Improving Teachers Capability To Implement Inclusive Education In Preschool Institutions. *6*(1), 67–79. https://doi.org/10.25105/jamin.v6i1.18848

Sulistyadi, H. K. (2014). Kebijakan dan Manajemen Publik Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, *2*(1), 1–10. www.kominfo.jatimprov.go.id

Tarlam, A., Ernawati, & Azizah, F. (n.d.). Peningkatan Kualitas Guru PAUD Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Inklusif di Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. *BAKTI MIFDA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., … Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. In *Annals of Internal Medicine* (Vol. 169, Issue 7, pp. 467–473). American College of Physicians. https://doi.org/10.7326/M18-0850

Utami, M. N., & Putra, W. B. (2020). Fasilitas Ruang Khusus pada Sekolah Inklusi Binar Indonesia (Bindo) di Bandung. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA |*, *2*(1), 34–43.

Wahyu, E., & Indira, M. (2019). *Kurikulum PAUD Inklusi Dalam Menghadapi Era Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES Seminar Nasional Pascasarjana*.

Yuniarni, D., Linarsih, A., Miranda, D., Halida, H., & Seli, S. (2023). Persepsi Guru TK terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pontianak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *7*(1), 629–636. https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3615

Yunitasari, S. E., Farista, D., Palupi, D. I., Yusnita, E., & Rohmah, S. (2022). Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Satuan Paud. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *3*(12), 1063–1071. https://doi.org/10.36418/japendi.v3i12.1397